



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 17 September 2016

Halaman: 9

KPU Dinilai Cenderung Tertutup

JOGJA, BERNAS – Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari tahun ke tahun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup transparan dalam penyampaian informasi mengenai proses Pilkada. Namun demikian, masih cenderung tertutup terkait detail profil calon.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) oleh publik? kata dia.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sedang berlangsung bersamaan dengan dibukanya pendaftaran Calon Kepala Daerah sepatutnya dicermati dengan seksama.

Menurut dia, tingginya kasus hukum yang menjerat 343 Kepala daerah berdasarkan data Kemendagri

DIY, Dewi Amanatun Suryani, Jumat (16/9) kemarin. Untuk itu, pihaknya mendorong membuka informasi kesehatan calon bupati atau walikota untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2017.

"Kondisi kesehatan fisik dan psikis calon kepala daerah merupakan hal substansial yang patut diketahui publik," kata dia.

pada 2015 menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi aktif publik dalam memilih calon Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah meletakkan dasar transparansi pada seluruh tahapan proses pemilu kepala daerah.

Kendati dalam Pasal 17 UU KIP disebutkan bahwa informasi pribadi

Dicontohkan, kasus Bupati Ogan Ilir yang tertangkap mengonsumsi narkoba, menjadi gambaran bahwa penyelenggara pemilu belum optimal membuka informasi calon kepala daerah kepada publik pada saat itu.

"Karena bagaimana mungkin calon kepala daerah yang terjerat narkoba beberapa waktu lalu bisa lolos menjadi kepala daerah tanpa diketahui

yang terdiri dari riwayat pendidikan, kapasitas dan kapabilitas intelektual, kesehatan fisik dan psikis, maupun kondisi keuangan dan aset seseorang merupakan informasi rahasia, namun jika hal tersebut berhubungan dengan posisi dan jabatan publik maka informasi tersebut menjadi terbuka sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU KIP.

► ke hal 15

KPU Dinilai Cenderung

Sambungan dari halaman 9

Oleh karena itu, penyelenggara pemilu maupun rumah sakit tempat di mana calon kepala daerah diperiksa wajib membuka informasi kondisi kesehatannya.

"Sehingga masyarakat memiliki banyak informasi terkait calon yang akan dipilih termasuk apakah memiliki ketergantungan terhadap narkoba atau tidak," ujarnya.

Menurut dia, saat ini merupakan momentum bagi masyarakat berperan aktif mengawal proses demokrasi yang transparan, jujur dan akuntabel untuk mendapatkan calon pemimpin yang dapat dipercaya, amanah, dan memikirkan rakyatnya.

"Hal itu hanya bisa dilaksanakan oleh pemimpin yang sehat jiwa raga dan berintegritas. Tanpa salah satunya kepala daerah akan disibukkan pada urusan pribadi apalagi jika kondisi kesehatannya perlu penanganan serius," kata Dewi Amanatun.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Wawan Budiarto, menyatakan kegagalan pasangan bakal calon kepala daerah saat tes kesehatan termasuk

tes kesehatan jiwa dan bebas narkoba berpotensi menggurkan kesempatan pasangan itu maju mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Syarat pencalonan itu bersifat kumulatif. Selain tes kesehatan ada juga syarat lain yang harus dipenuhi. Jika ada salah satu syarat yang tidak memenuhi, maka pencalonannya tidak bisa diproses," kata dia.

Menurut Wawan, KPU Kota Yogyakarta sudah menetapkan Rumah Sakit Jogja sebagai tempat pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani serta tes bebas narkoba untuk pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada 2017.

Berdasarkan peraturan, tes kesehatan bagi pasangan calon dapat dilakukan dalam rentang waktu antara 21 September hingga 27 September. "Kami masih terus berkoordinasi dengan RS Jogja untuk administrasi kegiatan tersebut," katanya.

Seluruh tes kesehatan bagi pasangan calon kepala daerah akan dilakukan secara serentak pada hari yang sama dan diharapkan hasilnya dapat diketahui dengan cepat.

"Hasil yang kami terima

adalah pernyataan dari pihak rumah sakit apakah pasangan calon yang bersangkutan mampu memenuhi syarat kesehatan yang sudah ditetapkan atau tidak," katanya.

KPU Kota Yogyakarta sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Ahli Psikologi dan Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta untuk merumuskan standar pemeriksaan yang akan dilakukan sebagai acuan bagi tim saat melakukan pemeriksaan kesehatan.

Sementara itu, Direktur RS Jogja Tuty Setyowati mengatakan, sudah menyiapkan dokter spesialis untuk setiap jenis pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan.

"Seluruh calon akan diperiksa oleh dokter spesialis yang sama," kata Tuty yang menyebut sudah ada alur pemeriksaan yang disiapkan.

RS Jogja siap melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon kepala daerah dan bisa menyelesaikannya dalam waktu satu hari. "Hasilnya pun bisa diketahui dengan cepat," ungkapnya.

(ant)

Lanjutan	tanggapi	ketahui	ters
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005